

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPSTSP Provinsi Sumatera Barat dikaji menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan diukur melalui variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel *Content of Policy* (Isi Kebijakan) yang terdiri dari enam indikator menunjukkan bahwa pada indikator kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, dan letak pengambilan keputusan yang dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan Grindle sudah berjalan baik. Namun, disamping itu, dalam indikator pelaksana program masih ditemukan ketidaksesuaian data antar instansi sehingga perlu ditelaah ulang untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, pada indikator sumber daya masih diperlukan penambahan pegawai berlatar belakang teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan.

Kemudian, variabel *Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi) terdiri dari tiga indikator menunjukkan bahwa pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat, indikator

karakteristik intitusi dan rezim, serta indikator kepatuhan dan daya tanggap berhubungan erat dalam implementasi kebijakan, karena kekuatan dan kepentingan para aktor akan mempengaruhi cara institusi merespon kebijakan. Sementara itu, karateristik institusi akan mempengaruhi sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat sudah mampu mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkatan risiko usaha. Pelaksanaan pelayanan perizinan sudah menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yakni dalam indikator pelaksana program dan sumber daya sehingga tetap perlu ditingkatkan guna mewujudkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.



6.2. Saran

1. DPMPTSP provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD Teknis agar proses perizinan yang memerlukan verifikasi teknis dapat diproses lebih cepat dan efisien.
2. Meningkatkan intensitas frekuensi sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan manfaat dari perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perizinan usaha berbasis risiko bagi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.
4. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi kepada masyarakat untuk menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengurusan izin.
5. Masih diperlukannya penambahan aparatur yang memiliki latar belakang teknis untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha berbasis risiko.

